

**BAHASA, PILIHAN KATA/ISTILAH, DAN TEKNIK
PENGACUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

OLEH:

MUHAMMAD WALIYADIN

DASAR HUKUM

UU NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG
PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN. LAMPIRAN II NOMOR 242 S.D. 248.

RUANG LINGKUP

- BAHASA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN;
- PILIHAN KATA/ISTILAH PERUNDANG-UNDANGAN; DAN PERATURAN
- TEKNIK PENGACUAN PERUNDANG-UNDANGAN. PERATURAN

BAHASA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Bahasa peraturan perundang-undangan pada dasarnya tunduk pada kaidah tata Bahasa Indonesia, baik pembentukan kata, penyusunan kalimat, teknik penulisan, dan pengejaannya. Namun bahasa peraturan perundang-undangan mempunyai corak tersendiri yang bercirikan pada kejelasan pengertian, kelugasan, kebakuan, keserasian, dan ketaatan asas sesuai dengan kebutuhan hukum, baik dalam perumusan maupun cara penulisan.

CIRI BAHASA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Lugas dan pasti, untuk menghindari kesamaan arti dan kerancuan;
- Bercorak hemat hanya kata yang diperlukan yang dipakai;
- Objektif dan menekan rasa subjektif (tidak emosi dalam mengungkapkan tujuan atau maksud);
- Membakukan makna kata, ungkapan atau istilah yang digunakan secara konsisten;
- Memberikan definisi atau batasan pengertian secara cermat;
- Perumusan kata yang bermakna tunggal atau jamak selalau dirumuskan seccara tunggal; dan
- Penulisan huruf kapital pada awal kata, frasa, atau istilah yang sudah didefinisikan, nama jabatan, nama profesi, nama institusi, jenis peraturan perundang-undangan, dan rancangan peraturan perundang-undangan.

CONTOH BAHASA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pasal ...

- (1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

Bandingkan dengan rumusan sbb:

Pasal ...

- (1) Permohonan beristeri lebih dari seorang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

CONTOH-2 BAHASA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pasal ...

Izin usaha perusahaan yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat dicabut.

Bandingkan dengan rumusan sbb:

Pasal ...

Perusahaan yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat dicabut izin usahanya.

PILIHAN KATA ATAU ISTILAH DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. Pergunakan kata meliputi untuk memberikan perluasan pengertian kata atau istilah yang sudah diketahui umum. Contoh:

“Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

- a. nama dan alamat percetakan perusahaan yang mealakukan percetakan blanko;
- b. jumlah blanko yang dicetak; dan
- c. Jumlah dokumen yang diterbitkan.”

PILIHAN KATA ATAU ISTILAH DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (LANJUTAN)

2. Gunakan kata paling untuk menyatakan maksimum dan minimum. Untuk jangka waktu gunakan frasa paling singkat atau paling lama. Contoh:
... dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun atau paling lama 20 (dua puluh) tahun.
3. Gunakan frasa paling sedikit atau paling banyak untuk menyatakan jumlah uang. Contoh:
...dipidana dengan pidana denda paling sedikit Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp1.000.000,00 (satu milyar rupiah).

PILIHAN KATA ATAU ISTILAH DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (LANJUTAN)

4. Gunakan frasa paling cepat atau paling lambat untuk menyatakan minimum atau maksimum terkait batas waktu. Contoh:

Surat permohonan izin usaha disampaikan kepada dinas perindustrian paling lambat tanggal 22 Juli 2011.

5. Untuk menyatakan makna termasuk pergunakan kata selain. Contoh: “Selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, RUPS dapat juga dilakukan melalui telekonferensi, video telekonferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat”.

PILIHAN KATA ATAU ISTILAH DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (LANJUTAN)

6. Untuk menyatakan pengandaian atau kemungkinan, pergunakan kata jika, apabila, dan dalam hal. contoh:

“Jika terjadi kekosongan jabatan Presiden, MPR segera menyelenggarakan sidang Paripurna MPR untuk melantik Wakil Presiden menjadi Presiden.”

“Apabila anggota KPK berhenti dalam masa jabatannya karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4), yang bersangkutan diganti dengan anggota pengganti sampai habis masa jabatannya.”

“Dalam hal Ketua tidak dapat hadir, sidang dipimpin oleh Wakil Ketua.”

PILIHAN KATA ATAU ISTILAH DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (LANJUTAN)

7. Untuk menyatakan sifat kumulatif, alternatif, dan kumulatif alternatif, penggunaan kata dan, atau, dan/atau. Contoh:

“Penyelenggara Pos wajib menjaga kerahasiaan, keamanan, dan keselamatan kiriman.”

“ Pengubahan sebagai akibat pemisahan atau penggabungan kementerian dilakukan dengan pertimbangan DPR.”

“Penghormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Penghormatan dengan bendera negara;

b. Penghormatan dengan lagu kebangsaan; dan/atau

c. Bentuk penghormatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

TEKNIK PENGACUAN PASAL

Teknik pengacuan pasal dipergunakan untuk menghindari terjadinya pengulangan perumusan. Teknik pengacuan dilakukan dengan menunjuk satu pasal atau ayat dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau peraturan perundang-undangan yang lain, dengan menggunakan frasa sebagaimana dimaksud dalam pasal atau sebagaimana dimaksud pada ayat. Contoh, “Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dilaksanakan oleh penyidik BNN.” “Penyidik BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala BNN.”

TEKNIK PENGACUAN PASAL (lanjutan)

- Pengacuan dilakukan dengan mencantumkan secara singkat materi pokok yang diacu. Contoh: “Izin penambangan batu bara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diberikan oleh...”
- Pengacuan hanya dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi.
- Hindari pengacuan ke pasal atau ayat setelah pasal atau ayat yang bersangkutan.
- Pengacuan untuk menyatakan berlakunya berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak disebutkan secara rinci, menggunakan frasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

TEKNIK PENGACUAN PASAL (lanjutan)

- Pengacuan lebih dari dua terhadap pasal, ayat, atau huruf yang berurutan tidak perlu menyebutkan pasal demi pasal, ayat demi ayat, dan huruf demi huruf yang diacu tetapi cukup dengan menggunakan frasa sampai dengan. Contohnya:

“...kepemilikan Bank Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 9 diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.”

TEKNIK PENGACUAN PASAL (lanjutan)

Pengacuan lebih dari dua terhadap pasal atau ayat yang bwerurutan, tetapi ada ayat dalam salah satu pasal yang dikecualikan, pasal atau ayat yang tidak ikut diacu dinyatakan dengan kata kecuali.

Contoh :

“Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 berlaku juga bagi calon hakim, kecuali Pasal 7 ayat (1).”

SEKIAN
DAN
TERIMA KASIH